

URGENSI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN TERHADAP PEMAHAMAN MAHASISWA TENTANG PENTINGNYA DEMOKRASI DI INDONESIA

Marta Satria Nugraha, Siti Tiara Maulia

Program Studi, Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan. Fakultas Keguruan
Dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi

Email : martasatria0034@gmail.com, sititiaramaulia@unja.ac.id

Abstrak

Pendidikan pancasila dan kewarganegaraan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pemahaman siswa tentang demokrasi. Tujuan penelitian tersebut misalnya untuk mengetahui urgensi pendidikan Pancasila dan dampaknya terhadap pemahaman mahasiswa. Memperdalam pemahaman siswa Anda tentang demokrasi. Mengetahui seberapa baik mahasiswa memahami konsep-konsep ini dapat membantu anda mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dan mengembangkan strategi yang lebih efektif untuk mengajar dan memperkenalkan nilai-nilai demokrasi kepada mahasiswa.

Penelitian ini memanfaatkan sifat penelitian SLR dengan mengumpulkan berbagai literatur dan jurnal yang didapat dan berkaitan dengan judul penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendidikan Pancasila mempunyai peranan paling penting dalam pembentukan karakter bangsa, karena Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Pendidikan Pancasila dapat digambarkan sebagai suatu proses yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk melakukan aktivitas kehidupan demokratis dengan tujuan menyadarkan dan memahami proses politik negara. Nilai-nilai Pancasila seperti keadilan sosial, demokrasi, dan kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi landasan penting untuk memperkuat pengetahuan siswa tentang makna demokrasi.

Kata kunci: Pendidikan, Kewarganegaraan, Demokrasi, Mahasiswa.

Abstrac

Pancasila and citizenship education has a significant influence on students' understanding of democracy. The aim of this research is, for example, to determine the urgency of Pancasila education and its impact on student understanding. Deepen your students' understanding of democracy. Knowing how well students understand these concepts can help you identify areas for improvement and develop more effective strategies for teaching and introducing democratic values to students.

This research utilizes the nature of SLR research by collecting various literature and journals obtained and related to the research title. The results of this research show that Pancasila education has the most important role in forming national character, because Pancasila is the basis of the Indonesian state. Pancasila education can be described as a process that provides opportunities for students to carry out democratic life activities with the aim of raising awareness and understanding the country's political processes. Pancasila values such as social justice, democracy and just and civilized humanity are an important foundation for strengthening students' knowledge of the meaning of democracy.

Keywords: Education, Citizenship, Democracy, Student.

PENDAHULUAN

Dengan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi serta dunia yang sudah semakin transparan di dalam hal informasi, komunikasi, dan transportasi, pemahaman mahasiswa terhadap demokrasi semakin melemah karena pesatnya perkembangan teknologi. Hal ini sangat mempengaruhi pemikiran, pola pikir dan sikap generasi muda, yang merupakan generasi penerus harapan bangsa. Bersangkutan dengan masalah ini, seluruh warga negara Indonesia khususnya generasi muda Indonesia harus terorganisasi dengan baik dan dinamis, pendidikan warga yang memahami kesadaran kebangsaan dan kebangsaan untuk menumbuhkan sikap warga negara. kesediaan berkorban untuk bangsa dan negara serta memupuk jiwa yang nasionalisme yang luhur bagi masyarakat dan negara Indonesia (Anggraeni Dewi et al., 2021)

Adapun Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk karakter dan juga membentuk wawasan kebangsaan Mahasiswa Indonesia. Karna Pancasila sebagai dasar negara, dan demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang di anut, mengharuskan adanya pemahaman yang mendalam dan komperenshif dari setiap warga negara, terutama untuk generasi muda yang merupakan penerus baangsa.

Pendidikan kewarganegaraan bertujuan untuk mengedepankan konsep status kebangsaan dan dapat dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pendidikan kewarganegaraan adalah untuk menciptakan generasi muda yang mampu menjaga keutuhan dan persatuan bangsa. Ciri-ciri pendidikan kewarganegaraan antara lain:

1. Membuat generasi muda memahami apa itu cita-cita nasional sebagai tujuan bangsa.
2. Membuat generasi muda dapat mengambil keputusan yang bertanggung jawab dalam menyelesaikan masalah baik masalah pribadi, komunitas, dan nasional.
3. Agar generasi muda dapat menghargai cita-cita bangsa yang sudah ada dari dulu dan dapat mengambil keputusan yang bijak.
4. Melalui terbentuknya manusia yang cerdas, kompeten, individualis dan setia kepada bangsa dan negara Indonesia dengan menanamkan kebiasaan berpikir dan bertindak sesuai dengan tugas Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Adapun pentingnya demokrasi di Indonesia yakni belum sepenuhnya dipahami, hal ini terlihat dari banyaknya masalah-masalah yang muncul dari rasa kebebasan atas sesuatu yang mendasar seperti hak untuk menerima dan menyampaikan informasi. Demokratisasi berfokus untuk mengedepankan kebebasan bekerja, berekspresi dalam ranah sosial masyarakat, termasuk berkomunikasi, berpikir, mengutarakan pendapat, dan lain-lain. Namun menurut Robert Dahl, demokrasi suatu negara sangat ditentukan bahwa rakyatnya mampu menggunakan kebebasan-kebebasan dasar yang telah dijelaskan di atas dengan baik dan benar, sehingga tidak muncul tatanan yang merugikan konflik. dan citra bangsa. Indonesia adalah negara yang tidak terlalu berpengalaman atas berdemokrasi, sehingga selalu ada "eksperimen" yang sering naik turun, sehingga sangat bergantung pada kesabaran semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat. Demokratisasi rakyat merupakan sebuah proses panjang yang sangat melelahkan, sehingga diperlukan kegiatan yangmempercepat demokratisasi rakyat Indonesia, salah satunya adalah bidang pendidikan (Fina Nur Syarifah et al., 2022).

(Eka Selvi Handayani & Euis Kusumari, 2022) adapun di dalam jurnalnya menjelaskan bahwa "Sosialisasi pendidikan hak asasi manusia di sekolah dasar"

menyatakan bahwa pendidikan merupakan salah satu cara untuk menanamkan pemahaman akan pentingnya menjamin, melindungi, dan menghormati hak asasi manusia. Dengan memahami pentingnya hak asasi manusia sejak dini, anak dapat mengembangkan karakter untuk menghargai dan melindungi hak asasi manusia. Tujuan pendidikan adalah untuk memberikan informasi kepada anak tentang pentingnya hak asasi manusia dan mendorong mereka untuk tidak melanggarnya. Kajian pendidikan kewarganegaraan diharapkan dapat membantu peserta didik memperkuat kemampuan saling menghormati, mengubah permasalahan menjadi peluang positif, dan memperkuat potensi persatuan. Ini adalah proses dimana masyarakat belajar menjadi warga negara yang beradab melalui praktik yang tepat dalam kehidupan sehari-hari, seperti saling menghormati perbedaan ide, pendapat, dan keyakinan. Kemampuan warga negara dalam menghadapi permasalahan berarti setidaknya konflik-konflik yang sering terjadi dalam hubungan sosial dapat di minimalisir.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis kualitatif, khususnya berfokus pada tinjauan literatur. Menurut (Safitri & Anggraeni Dewi, 2021) metode ini dilakukan dengan cara menganalisis data dari sumber sekunder artikel-artikel penelitian yang terkait dengan masalah penelitian. Hasil dari penelitian ini akan menunjukkan bagaimana tantangan dan peluang pendidikan pancasila dan kewarganegaraan di era digital.

Pendekatan analisis kualitatif memungkinkan kami untuk memperhatikan aspek-aspek yang lebih dalam dan lebih subjektif dari penelitian ini. Pendekatan ini memungkinkan kami untuk menggali informasi yang lebih spesifik dan memahami konsep dan pemahaman yang diberikan oleh para penulis literatur yang dipilih.

Dalam melakukan analisis literatur, kami akan mempertimbangkan faktor-faktor seperti konsep-konsep kunci, bukti-bukti, dan saran-saran yang diberikan oleh para penulis. Hal ini akan membantu kami mengekstrak informasi penting dan membentuk serangkaian argumen yang konsisten dan logis.

Dengan menggabungkan hasil analisis dan penggalian informasi yang ringkas, kita dapat memperoleh gambaran menyeluruh tentang tantangan dan peluang yang dihadapi oleh pendidikan kewarganegaraan dan Pancasila di era digital. Informasi ini akan membantu kita dalam membuat rekomendasi atau upaya untuk mengatasi tantangan dan memperkuat pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan di masa depan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan

Pendidikan pancasila dan kewarganegaraan ialah suatu bentuk sistem pembelajaran yang di tujukan guna membentuk kesadaran serta karakter warga Indonesia yang baik dan bertanggung jawab.

Pendidikan Kewarganegaraan atau bisa juga disebut (*Civic Education*) adalah suatu program pendidikan yang bertujuan untuk menciptakan warga negara yang baik dan cerdas (*good and smart citizen*) dalam suatu negara, sehingga mereka dapat bertindak aktif dan bertanggung jawab untuk memajukan keberlangsungan negara. pemerintahan demokratis yang tidak terbatas pada jam sekolah biasa tetapi juga kepada masyarakat, khususnya dalam bidang sosial. Pendidikan kewarganegaraan merupakan salah satu cara yang tepat untuk melaksanakan cita-cita yang diharapkan dari negara (Khairunisa & Damayanti, 2023).

Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan selalu bertujuan untuk mengembangkan karakter generasi muda. Oleh karena itu, tidak dapat dipungkiri bahwa seluruh guru pendidikan kewarganegaraan senantiasa memikirkan strategi untuk memperkuat karakter setiap siswa sepanjang proses pembelajaran. Mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan pada semua jenjang pendidikan pada dasarnya bertujuan untuk menanamkan pada generasi muda semangat kebangsaan dan nasionalisme serta menjadikannya landasan perilaku dan perilaku yang membekali mereka dengan keterampilan dan profesi yang akan ditekuni di masa depan. (Asyari & Anggraeni Dewi, 2022).

Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa tujuan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan adalah untuk memberikan perisai pada bangsa apalagi terhadap generasi muda agar terhindar dari dampak negatif dan pengaruh negatif yang dapat merugikan bangsa itu sendiri. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan juga bertujuan untuk mendidik warga negara yang cerdas, berkompeten, dan setia secara fundamental terhadap negara dan bangsa Indonesia, yang mencerminkan gagasan dan tindakan masyarakat. Tatanan Pancasila dan UUD 1945 tetap menjaga negara ini, dan walaupun ada serangan dari luar, serangan itu bisa digagalkan oleh nilai-nilai moral yang mengatur pendidikan kewarganegaraan itu sendiri.

Definisi Demokrasi

Demokrasi berasal dari kata Yunani “demos” yang berarti “rakyat” dan “kratos” yang berarti “pemerintahan”. Oleh karena itu, demokrasi adalah pemerintahan yang kedaulatannya berada di tangan rakyat. Demokrasi berarti suatu bentuk pemerintahan yang memungkinkan seluruh individu hidup bebas, namun tetap harus bertanggung jawab.

Demokrasi adalah istilah yang sangat populer. Dalam wacana politik, tidak ada istilah lain yang banyak diperdebatkan di kalangan aktivis, politisi, dan akademisi selain istilah demokrasi. Istilah ini juga diinginkan oleh semua orang, terutama masyarakat yang sadar politik, untuk dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Mereka berpendapat bahwa demokrasi lebih membawa manfaat bagi umat manusia dibandingkan dampak negatifnya, yaitu proses perumusan kebijakan publik yang mahal dan rumit. (Rohmah Iftitah, 2014). Adapun menurut (Rosana, 2016) Demokrasi merupakan bentuk sistem politik suatu negara dan budaya politik suatu negara. Namun, Wilson Churchill dengan jujur mengakui bahwa meskipun demokrasi sebenarnya bukanlah sistem pemerintahan terbaik, tidak ada sistem lain yang lebih baik daripada demokrasi. Hal ini menunjukkan bahwa demokrasi ini unik. Meskipun berbagai jenis rezim politik di seluruh dunia menamakan diri mereka demokrasi, perkataan dan tindakan mereka sering kali sangat berbeda-beda. Padahal, sejarah konsep demokrasi sangat kompleks dan banyak diwarnai konflik konseptual.

Demokrasi Indonesia sendiri, meskipun dalam bentuk yang sederhana, sudah ada sejak lama. Demokrasi yang dianut Indonesia saat ini adalah demokrasi Pancasila. Namun masih banyak kesalahpahaman mengenai demokrasi yang belum dikuasai dan dipahami oleh masyarakat Indonesia. Hal ini terlihat dari banyaknya perselisihan yang muncul ketika banyak pihak merasa bebas dalam haknya untuk mengirim dan menerima informasi.

Menurut Nurkholis Madjid dalam (Khaldia Berlian & Anggraeni Dewi, 2021), terdapat enam unsur ciri dari suatu negara yang demokratis, yakni sebagai berikut :

1. Pengakuan akan adanya perbedaan atau pluralisme: Pengakuan ini bukan sekadar pengakuan tanpa tindakan, melainkan adanya respon, tindakan, atau reaksi positif terhadap perbedaan yang ada.

2. Nasihat: Nasihat adalah bagian dari negosiasi dan kompromi sosial, namun harus dilakukan secara damai dan bebas. Pertimbangan ini mengakibatkan diterimanya pandangan yang tidak sesuai dengan pandangan kita
3. Jalan yang sesuai dengan tujuan Anda: Ini didasarkan pada demokrasi dan bukan sistem yang kaku atau memaksa. Oleh karena itu pelaksanaannya harus sopan dan beradab. Dengan kata lain, hal ini harus bersifat sukarela, berbasis dialog, dan saling menguntungkan.
4. Konsensus harus disertai kejujuran: Kejujuran timbul dari integritas. Oleh karena itu, jika integritas dapat diterapkan pada seluruh masyarakat di suatu negara, maka integritas merupakan tonggak sejarah dalam tradisi demokrasi.
5. Kebebasan Hati Nurani : Sikap ini harus dibarengi dengan keyakinan akan kebaikan semua individu dan kelompok. Hal ini memudahkan terjadinya kompromi antara satu pihak dengan pihak lainnya.
6. Trial and Error: Demokrasi bukanlah suatu bentuk yang siap pakai, melainkan suatu proses panjang yang memerlukan trial and error hingga muncul kesalahan, sehingga demokrasi suatu negara menjadi lebih baik dan utuh.

Mewujudkan Masyarakat yang Paham Akan pentingnya Demokrasi Dengan PKN

Menurut Wilson Churchill, demokrasi bukanlah bentuk pemerintahan atau sistem politik terbaik, namun tidak ada sistem yang lebih baik dari ini. Sistem politik suatu negara berkaitan dengan dua hal. yakni institusi (struktur) dan perilaku (budaya). Oleh karena itu, jika kita ingin membangun masyarakat demokratis, kita perlu menciptakan keselarasan antara struktur demokrasi dan budaya demokrasi. lembaga atau lembaga adalah organ politik suatu negara dan meliputi::

1. Pemerintahan Terbuka dan Akuntabel
2. parlemen
3. Sistem Pemilu
4. Organisasi Politik
5. Lembaga swadaya masyarakat
6. Media massa.

Sedangkan perilaku atau budaya merujuk pada berlakunya nilai nilai demokrasi di Indonesia. Masyarakat demokratis adalah masyarakat yang berperilaku sebagai berikut :

1. Damai dan sukarela
2. Adil
3. Menghargai perbedaan
4. Menghormati kebebasan
5. Memahami keanekaragaman
6. Teratur
7. Paksaan yang minimal
8. Memajukan ilmu.

Berdasarkan keterangan di atas, demokrasi tidak hanya memerlukan lembaga, undang-undang, peraturan dan lembaga lainnya, namun demokrasi juga membutuhkan sikap dan tindakan masyarakat untuk menjaga nilai-nilai luhurnya. Pendidikan kewarganegaraan merupakan upaya demokratisasi suatu negara dan tidak dapat dinegosiasikan atau ditunda oleh siapapun. Negara yang berkomitmen secara demokratis seperti Indonesia tidak dapat mengabaikan hal ini dengan melakukan upaya sistematis dan konseptual untuk mengintegrasikan pendidikan kewarganegaraan ke dalam konteks pembangunan. Dapat dilihat juga bahwa tujuan pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi adalah untuk mempelajari isi tugas

dan hak agar mahasiswa dapat secara harmonis memenuhinya dalam tataran kehidupan demokrasi di Indonesia.

Kedaulatan rakyat, diskusi dan kesepakatan. Tujuan mempelajari materi Demokrasi Indonesia adalah agar siswa memahami hakikat, makna, dan praktik demokrasi Indonesia sebagai alat untuk memakmurkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan pemerintahan yang adil.

KESIMPULAN

Adapun menurut (Asyari & Anggraeni Dewi, 2022) Pendidikan kewarganegaraan selalu bertujuan untuk mengembangkan karakter generasi muda. Oleh karena itu, tidak dapat dipungkiri bahwa seluruh guru pendidikan kewarganegaraan senantiasa memikirkan strategi untuk memperkuat karakter setiap siswa sepanjang proses pembelajaran. Mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan pada semua jenjang pendidikan pada dasarnya bertujuan untuk menanamkan pada generasi muda semangat kebangsaan dan nasionalisme serta menjadikannya landasan perilaku dan perilaku yang membekali mereka dengan keterampilan dan profesi yang akan ditekuni di masa depan..

Demokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan yang mendukung partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan terciptanya ketertiban umum. Dalam demokrasi, hak asasi manusia, kebebasan berpendapat dan persamaan di depan hukum dijamin dan dilindungi. Sistem ini mendorong keterbukaan, akuntabilitas dan keadilan sosial serta memberikan ruang bagi perbedaan pendapat dan pluralisme. Keberhasilan demokrasi tergantung pada kesadaran dan partisipasi aktif warga negara dalam berbagai aspek kehidupan politik dan sosial. Dengan demikian, demokrasi bukan hanya sekedar bentuk pemerintahan, tetapi juga prinsip dan nilai yang harus dianut dalam kehidupan sehari-hari untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur..

Meskipun demokrasi sulit diterapkan di Indonesia karena banyaknya tafsir, kritik dan kendala. Namun, demokrasi pada hakikatnya mempunyai potensi membawa kebaikan bagi masyarakat, terutama dengan menghindari pemerintahan yang opresif. Demokrasi juga menciptakan kesetaraan atau keseimbangan baik politik maupun hak asasi manusia untuk mencapai kehidupan yang bermartabat, berkumpul dan berpendapat yang bertanggung jawab. dari.

Oleh sebab itu Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) merupakan kunci utama dalam membangun kesadaran dan pemahaman mahasiswa tentang prinsip-prinsip demokrasi serta nilai-nilai Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia. Melalui Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), mahasiswa belajar mengenai hak dan kewajiban sebagai warga negara, pentingnya partisipasi dalam proses demokratis, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia dan keberagaman. Pendidikan ini membentuk karakter yang demokratis, mendorong keterlibatan aktif dalam kehidupan politik, dan mengembangkan sikap kritis serta tanggung jawab sosial. Dengan demikian, PPKn tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pendidikan, tetapi juga sebagai fondasi untuk mewujudkan dan memperkuat praktik demokrasi di Indonesia

DAFTAR RUJUKAN

Anggraeni Dewi, D., Ichas Hamid, S., Asyari, D., Setiawati, R., & Istiqomah, Y. (2021). *IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN UNTUK*

MEWUJUDKAN IDENTITAS DAN INTEGRITAS NASIONAL.

<https://jbasic.org/index.php/basicedu>

Asyari, D., & Anggraeni Dewi, D. (2022). *Peran Pendidikan Kewarganegaraan bagi Generasi Milenial dalam Menanamkan Jiwa Nasionalisme Di Era Globalisasi.*

Eka Selvi Handayani, & Euis Kusumari. (2022). *SOSIALISASI PENDIDIKAN HAK ASASI MANUSIA DI SEKOLAH DASAR 1.*

Fina Nur Syarifah, Hilda Dwi Chayani, Intan Nisrani Kamilah, & Gunawan Santoso. (2022). Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Wawasan Demokrasi Warga Negara. *Jurnal Pendidikan Transformatif*, Vol. 01 No.02, 122–131.

Khairunisa, W., & Damayanti, S. (2023). Pentingnya Pendidikan Kewarganegaraan bagi Suatu Negara pada Generasi Milenial Abad-21. *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya*, 9(1), 35. <https://doi.org/10.32884/ideas.v9i1.1209>

Khalda Berlian, R., & Anggraeni Dewi, D. (2021). URGENSI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM MEMBENTUK NEGARA DEMOKRATIS DAN MEWUJUDKAN HAK ASASI MANUSIA. In *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* (Vol. 9, Issue 2).

<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP>

Rohmah Iftitah, N. (2014). *ISLAM DAN DEMOKRASI.*

Rosana, E. (2016). *NEGARA DEMOKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA.*